

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kontemporer ini tidak sedikit kebijakan pemimpin yang mendapatkan pertentangan dari rakyat. Rakyat beranggapan, dalam membuat suatu keputusan kebanyakan para pejabat hanya melihat kepentingan golongannya saja. Sedangkan secara esensi kebijakan dibuat sebagai alat seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebelum membahas lebih banyak tentang kebijakan pemimpin, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang pemimpin, dimana pemimpin itu yang berhak mengeluarkan suatu kebijakan.

Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengatur dirinya. Keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial, bisa dibayangkan apabila tidak ada pemimpin maka kehidupan bermasyarakat tidak bisa terorganisir. Dalam Islam pemimpin sering dikenal dengan istilah khalifah. Jika melihat sejarah, Allah menciptakan Nabi Adam a.s sebagai khalifah di bumi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹

Dalam kitab tafsir Al-Azhar, istilah Adam sebagai khalifah disini memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu khalifah dari Adam-adam yang

¹ Al-Qur'an, *Mushaf Aisyah : Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 6.

terdahulu yang menurut setengah ahli tafsir jumlahnya mencapai sejuta Adam. Penafsiran kedua yaitu *khalifah dari Allah sendiri*, sebagaimana disebutkan juga dalam Q.S An-Naml (20:62) dari sekian banyaknya makhluk Allah, Allah memilih manusia menjadi khalifahNya. Pada manusia Allah menyatakan hukum dan peraturanNya, sebagai khalifah manusia memiliki tugas untuk mengatur bumi. Dengan akal yang dianugerahkan kepadanya manusia mampu menguasai dan mengatur bumi. Buktinya, manusia telah berhasil menguasai dan menyelami lautan, mampu berkomunikasi sesama manusia meskipun berbeda pulau dan mungkin akan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang akan dikerjakan manusia.²

Menurut Quraish Shihab, al-Baqarah ayat 30 mengisyaratkan adanya dua unsur pokok kekhalifahan dan satu di luar unsurnya. Unsur pertama, kata *khalifah* menunjukkan isyarat bahwa khalifah merupakan sosok yang ditugaskan sebagai penguasa tertinggi ataupun perorangan. Kedua, unsur tempat penugasan, bumi merupakan tempat manusia/khalifah hidup, sudah semestinya seorang khalifah memiliki tugas yang harus dikerjakan di bumi meskipun tidak dijelaskan secara langsung bentuk tugas pada ayat ini. Ketiga, kalimat “*Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah*” menunjukkan isyarat adanya Allah SWT sebagai pemberi tugas.³

Dalam Islam seorang pemimpin memiliki jabatan yang sangat mulia, dimana seorang pemimpin memiliki peran penting dalam perjalanan umat dan setiap perjalanan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dalam kitab

² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), 161–162.

³ M. Quraish Shihab, *Khalifah: Peran Manusia Di Bumi*, ed. Mutimmatun Nadhifah (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), 51.

suci Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa suatu umat harus memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan peran kenabian, menegakkan ajaran agama, mengendalikan politik dan kebijakan berdasarkan hukum agama dan menyatukan umat dalam satu kepemimpinan. Namun saat ini banyak pemimpin yang hanya menggunakan agama Islam sebagai identitas semata, mereka lebih mementingkan kemaslahatan diri sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain dan lingkungannya.

Dalam Islam kepemimpinan tidak hanya sekedar mengambil keputusan dan pengarahan tetapi lebih dari memberikan teladan moral yang baik bagi pengikutnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, memimpin umatnya dengan kejujuran, keadilan dan Amanah. Selain itu kepemimpinan juga penting sebagai pelayanan, dimana pemimpin harus bisa memahami dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Nabi Muhammad dalam menjalankan pemerintahan tidak secara semena-mena mengambil keputusan dan tidak memusatkan pemerintahan pada dirinya. Dalam mengambil keputusan politik Rasulullah melakukan musyawarah dengan pemuka-pemuka masyarakat. Ada empat cara Rasulullah dalam mengambil keputusan di antaranya; Musyawarah, meminta pertimbangan dari kalangan profesional, membuat forum untuk memecahkan masalah yang berdampak luas, mengambil keputusan sendiri.⁴ Di dalam surah al-Fatḥ ayat 29 dan surah Āli 'Imrān ayat 159 dijelaskan tentang sifat dan karakter Rasulullah dalam memimpin umat.

⁴ Rifki Syahputra, Sugeng Widodo, and Surahman, "Kepemimpinan Rasulullah Saw, Para Sahabat, Dan Tabi'in-Tabi'in," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 5 (2022): 1556.

Q.S Al-Fath [26] :29

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا⁵

Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah untuk memimpin umat manusia melalui ajaran Islam yang tidak diragukan lagi. Rasulullah bersama para sahabat memiliki sikap yang keras kepada orang-orang kafir tetapi bersikap lemah lembut terhadap orang beriman.⁶

Q.S Āli ‘Imrān [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ⁷

Ayat ini menegaskan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat Rahmat Allah sehingga Rasulullah memiliki sikap yang lembut. Meskipun sebagian kaum Muslimin melakukan pelanggaran yang menimbulkan penderitaan kaum Muslimin lainnya saat Perang Uhud, Rasulullah tetap lemah lembut dan memaafkan serta Rasulullah memohon ampunan bagi mereka dari Allah SWT. Selain itu Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal, sehingga kaum Muslimin patuh terhadap keputusan-keputusan musyawarah bersama Nabi Muhammad Saw.⁸ Dalam memimpin umat, Rasulullah memiliki sifat yang tegas, beriman kepada Allah,

⁵ Al-Qur'an, *Mushaf Aisyah : Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*, 515.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Jilid 13)*, ed. Achmad Yazid Ichsan and Muhammad Badri H, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2013), 440.

⁷ Al-Qur'an, *Mushaf Aisyah : Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*, 71.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Volume 2)*, Cetakan 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 256–263.

lemah lembut, pemaaf, belas kasih, suka bermusyawarah dan tawakal. Rasulullah memiliki prinsip mengarahkan kepada kebenaran, kemajuan, kebaikan dan keberhasilan. Jika dibandingkan dengan pemimpin saat ini, sangat jauh berbeda. Pemimpin saat ini secara diam-diam maupun terbuka telah banyak memberikan penderitaan kepada masyarakat. Pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab memegang kepentingan orang banyak. Tanggung jawab tersebut diberikan atas dasar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun pada kenyataannya, tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, banyak kebijakan dari pemerintah yang menimbulkan kekecewaan dan ketidakadilan dalam hati masyarakat.⁹

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan saat ini seakan-akan hanya memberikan keuntungan kepada pihak pemerintah saja. Padahal adanya kebijakan pemerintah bertujuan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Kebijakan merupakan suatu program kegiatan, nilai, taktik, dan strategi yang dipilih dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu.¹¹ Secara umum kebijakan pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan dan keputusan. Kebijakan pemerintah bisa disebut dengan sebuah hukum, dimana ketika ada isu yang

⁹ Ayu Cintana et al., "Etika Mengkritik Pemerintah Menurut Buya Hamka Dan Wahbah Az-Zuhaili Atas QS. Thaha Ayat 43-48," *Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 286.

¹⁰ Muharrir Mukhlis, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah," *Bpsdm Sulawesi Selatan*, last modified 2023, accessed September 16, 2024, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>.

¹¹ Kismartini, *Pengertian Kebijakan Pemerintahan, Article*, 2019, 3, <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>.

menyangkut kepentingan bersama dan perlu untuk adanya pengaturan maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan pemerintah yang harus disusun dan dilakukan serta disepakati oleh para pihak berwenang.¹²

Jika dilihat saat ini banyak kebijakan pemerintah yang bertolak dengan keinginan masyarakat. Buktinya, pemerintah Indonesia banyak mendapatkan demo dari masyarakat terkait keputusan yang mereka buat. Masyarakat menilai elite politik lebih mementingkan kepentingan kelompok oligarki¹³ politik dibandingkan kepentingan rakyat. Hal ini terlihat dari rancangan undang-undang yang bermasalah, seperti UU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang telah disahkan dinilai melemahkan sejumlah pasal, misalnya terkait izin penyadapan dari dewan pengawas. Masyarakat menilai cara-cara yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai problem di daerah sering menggunakan cara-cara non-persuasif.¹⁴ Selain itu kebijakan pemerintah yang dikritik masyarakat, di antaranya;

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pekerja membayar iuran wajib Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sebesar 3 % dari upah. Kebijakan ini banyak mendapatkan penolakan karena dinilai semakin memberatkan pekerja dan pengusaha. Menurut Feri Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, pemerintahan Jokowi terkesan sembrono dalam membuat kebijakan sehingga banyak mendapat protes. Sebelumnya juga ada dua kebijakan yang ditunda akibat penolakan publik yaitu pembatasan barang bawaan dari luar negeri

¹² Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, ed. Beni Ahmad Saebani, Cet. I. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 37–39.

¹³ Oligarki merupakan bentuk kekuasaan golongan elit yang mengendalikan politik dan ekonomi.

¹⁴ Christoforus Ristianto and Diamanty Meiliana, “Tiga Alasan Ini Diduga Jadi Alasan Mengapa Demonstrasi Terus Berlanjut,” *KOMPAS.Com*.

dan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).¹⁵ Fenomena ini berbanding terbalik dengan tujuan adanya kebijakan pemerintah, dimana suatu kebijakan dibuat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan rakyat terpenuhi. Jika selama ini kebijakan pemerintah dinilai masih kurang baik, lalu bagaimana kebijakan pemerintah yang baik itu?

Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis berusaha melakukan analisis terkait konsep kebijakan pemimpin melalui ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an adalah pedoman hidup makhluk Allah. Penelitian ini mengacu pada penafsiran Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar karena dalam penafsirannya Hamka banyak mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan isu-isu politik dan kepemimpinan Indonesia. Hamka tidak jarang mengkritik praktik politik yang tidak sesuai dengan prinsip islam. Sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Azhar saat menafsirkan Q.S Āli 'Imrān ayat 187, Hamka menilai Pemerintah Indonesia semakin hari semakin mengarah diktator dan kezaliman, Hamka juga menceritakan perasaan syukurnya karena bisa lepas dari jabatan pegawai negeri. Hamka merasa selama 9 tahun kebebasannya berhenti karena mempertentangkan *beleid*¹⁶ pemerintah.¹⁷ Pada penafsiran Q.S Fatir ayat 2, Hamka juga menyinggung terkait pangkat seorang, apabila Allah menahan Rahmat-Nya maka pangkat dan jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri. Peraturan seakan-akan hanya

¹⁵ Erwina Rachmi Puspapertiwi, "Banyak Aturan Ditunda Usai Tuai Penolakan Pemerintah, Dinilai Sembrono Dalam Membuat Kebijakan," *KOMPAS.Com*, last modified 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/08/080000765/banyak-aturan-ditunda-usai-tuai-penolakan-pemerintah-dinilai-sembrono-dalam>.

¹⁶ *Beleid* merupakan langkah dalam mewujudkan dan melaksanakan program dan sebagainya atau bisa juga disebut dengan kebijakan.

¹⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), 1025.

berlaku untuk masyarakat yang tidak berkuasa. Hal ini terlihat ketika ada penguasa (orang yang memiliki kekuasaan) melanggar peraturan/undang-undang tidak ada hukum yang menyertainya dan tidak ada yang berani menuntutnya.¹⁸

Tafsir Al-Azhar merupakan produk penafsiran yang lahir dengan konteks sosio-historis dan pengalaman hidup mufasirnya. Sehingga untuk memahami makna konsep kebijakan pemimpin yang ada dalam tafsirnya dan relevansinya pada pemerintahan masa kini tidak cukup dengan pendekatan diskriptif dan tekstual saja, dibutuhkan pendekatan yang mampu mengungkap dinamika anatara teks, konteks mufassir dan pembaca masa kini. Hermeneutika Hans-Georg Gadamer menjadi pendekatan yang relevan dalam peneliian ini karena pendekatan tersebut menawarkan kerangka filosofis yang menekankan bahwa pemahaman bukan hanya proses reproduksi makna secara pasif, tetapi merupakan hasil dari dialog antara horizon makna penafsir (masa lalu) dan horizon pembaca (masa kini). Pendekatan hermeneutika Gadamer digunakan agar penelitian ini mampu mengali penafsiran Hamka secara mendalam dan historis, membuka dialog antara tafsir klasik-modern dan kebutuhan masa kini serta menghindari pemahaman statis. Dari hasil analisis penelitian ini, diharapkan bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya seorang pemimpin dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan diterima oleh rakyatnya dengan baik.

¹⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 8* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), 5893.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan,

1. Bagaimana konsep kebijakan pemimpin menurut Tafsir Al-Azhar ?
2. Bagaimana pendekatan hermeneutika Gadamer dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pemimpin dalam Tafsir Al-Azhar ?
3. Bagaimana relevansi sistem kebijakan pemimpin yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Azhar dengan kebijakan pemimpin Negara Indonesia saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain;

1. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kebijakan pemimpin melalui penafsiran Hamka.
2. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kebijakan pemimpin dalam Tafsir Al-Azhar melalui pendekatan hermeneutika Gadamer.
3. Penelitian ini bertujuan mencari relevansi konsep kebijakan pemimpin yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan sistem kebijakan pemimpin negara Indonesia saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang kepemimpinan, terutama pengetahuan tentang konsep kebijakan pemimpin yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan bagaimana seharusnya seorang pemimpin dalam membuat kebijakan/keputusan. Penelitian ini juga bisa memberi informasi tambahan bagi para pemimpin, baik pemimpin tingkat bawah maupun tingkat atas

agar bisa menjadi pemimpin baik yang diRidhai Allah SWT dan tidak menyengsarakan rakyatnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar serta memudahkan pemahaman tentang judul, maka penulis memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Konsep

Konsep merupakan kesepakatan bersama untuk memahami sesuatu atau alat intelektual untuk berpikir dan memecahkan masalah.¹⁹ Dalam konteks kebijakan pemimpin menurut tafsir Al-Azhar, konsep yang penulis maksud adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kebijakan

Kebijakan dalam konteks ini merupakan sebuah tindakan atau keputusan yang diambil seorang pemimpin untuk mengarahkan dan mengatur masyarakat.

3. Pemimpin

Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuasaan.²⁰ Pemimpin dalam konteks ini merujuk pada pemerintah dan presiden pada 10 tahun terakhir (2015-2025).

¹⁹ Erwan Effendy et al., "Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2.

²⁰ Nurhalim et al., "Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi Dan Profil Kepemimpinan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 3.

4. Studi Tafsir

Yang dimaksud studi tafsir pada skripsi ini adalah telaah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Hamka untuk menggali makna ayat secara mendalam dan kontekstual masa kini.

5. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar merupakan karya tafsir Hamka yang menjadi objek utama penelitian ini. Penafsiran Hamka tidak hanya menjelaskan makna tekstual saja tetapi juga menghubungkan dengan realitas sosial-politik. Sehingga Tafsir Al-Azhar dianggap relevan untuk mengkaji konsep kebijakan pemimpin secara kontekstual.